

POLICY BRIEF

Ditujukan Kepada:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Disusun Oleh:

Fajar Lingga Prasetya, S.AB

(Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pusjar SKMP)

Muhammad Rizal A, SAP

(Peserta Magang SIAPKERJA Kemenaker)

**EDISI
JANUARI
2026**

**“Kajian Awal Kebijakan
Work From Mall sebagai
Instrumen Pendukung
Pemulihan Ekonomi”**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, normalisasi pasca pandemi, serta moderasi konsumsi rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada sektor perdagangan dan ritel modern, termasuk pusat perbelanjaan (mall), yang mengalami penurunan intensitas kunjungan dan transaksi. Dalam konteks tersebut, pemerintah mengkaji kebijakan Work From Mall (WFM) sebagai bagian dari kebijakan work from anywhere untuk mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi domestik.

Meskipun WFM berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi jangka pendek, kebijakan ini menghadapi sejumlah isu strategis, antara lain: potensi bias manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha besar di mall dibandingkan UMKM; belum jelasnya dampak WFM terhadap efektivitas kerja ASN dan kualitas pelayanan publik; serta risiko kebijakan yang bersifat simbolik tanpa kontribusi signifikan terhadap penguatan struktur ekonomi nasional.

Alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi: (a) integrasi UMKM secara sistematis dalam ekosistem WFM; (b) diferensiasi penerapan WFM antara ASN dan pekerja non-ASN dengan pengaturan berbasis fungsi dan output; serta (c) pengembangan ruang kerja alternatif di luar mall yang lebih dekat dengan ekosistem ekonomi rakyat dan daerah.

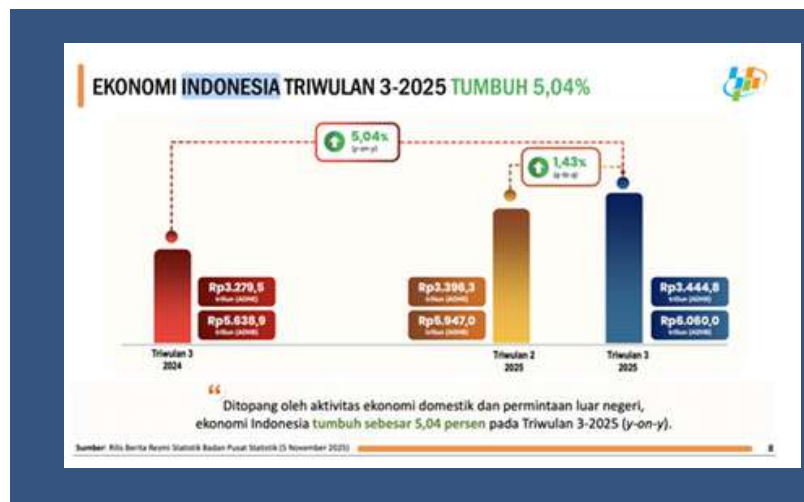
Policy brief ini merekomendasikan agar kebijakan WFM diterapkan secara selektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga, dengan menjadikan keterlibatan UMKM sebagai prasyarat utama, pembatasan penerapan bagi ASN pada fungsi tertentu, serta integrasi WFM dalam kerangka kebijakan pemulihan ekonomi nasional agar berdampak inklusif dan berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mencari terobosan kebijakan yang mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen pada kuartal III-2025 secara year-on-year (YoY), lebih rendah dibandingkan periode optimistis sebelumnya dan di bawah proyeksi beberapa lembaga internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen secara tahunan.

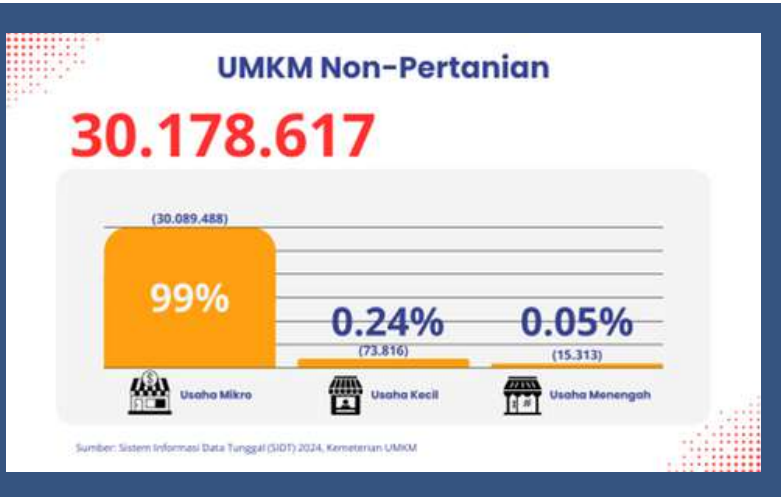
Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan dari melemahnya permintaan global, penurunan harga komoditas tertentu, serta konsumsi domestik yang tidak sekuat periode pascapandemi. Dalam situasi seperti ini, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus didorong agar tidak mengalami kontraksi.



Kondisi global yang kurang kondusif dan konsumsi domestik yang moderat menjadi faktor penekan utama pertumbuhan. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai perlu adanya stimulus baru agar konsumsi masyarakat tetap bergerak, terutama di sektor jasa dan ritel. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memanfaatkan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif (Work From Mall), dengan harapan meningkatkan lalu lintas kunjungan dan dampaknya terhadap konsumsi domestik.

Di sisi lain, terjadi perubahan signifikan dalam pola kerja dan gaya hidup masyarakat. Praktik kerja jarak jauh dan fleksibel semakin diterima, terutama di sektor jasa, ekonomi digital, dan administrasi. Pemerintah merespons perubahan ini dengan mengembangkan konsep work from anywhere, salah satunya melalui wacana Work From Mall, yakni pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif. Mall dipandang memiliki keunggulan infrastruktur yakni akses internet, listrik, ruang nyaman, dan fasilitas pendukung yang dinilai dapat menunjang produktivitas kerja sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan meningkatnya aktivitas pekerja di mall, diharapkan terjadi peningkatan konsumsi pada sektor makanan, minuman, dan ritel, sehingga membantu menggerakkan kembali roda ekonomi. Namun demikian, sebagai kebijakan publik, WFM tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar tentang keberpihakan, efektivitas, dan dampak jangka panjangnya. Apakah kebijakan ini benar-benar menjawab akar persoalan ekonomi? Siapa yang paling diuntungkan? Dan bagaimana implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik?

DESKRIPSI MASALAH



1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi dan Tekanan Konsumsi Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan kecenderungan melambat dibandingkan target optimistis pemerintah sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih moderat, sementara sektor ritel menghadapi tantangan akibat pergeseran belanja masyarakat ke platform daring.

Dalam kondisi ini, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan konsumsi jangka pendek seperti WFM menjadi pilihan cepat, namun berisiko tidak menyentuh akar persoalan struktural ekonomi.

2. Bias Ekonomi dalam Ekosistem Mall

Mall merupakan ruang ekonomi yang secara struktural lebih menguntungkan pelaku usaha besar dan menengah. UMKM, meskipun menyumbang lebih dari 99 persen unit usaha dan menyerap mayoritas tenaga kerja nasional, relatif terpinggirkan dari ekosistem ritel modern karena tingginya biaya sewa dan standar operasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM dan sektor ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, mayoritas UMKM beroperasi di luar pusat perbelanjaan modern karena keterbatasan modal dan tingginya biaya sewa gerai mall.

Kondisi ini membuat kebijakan yang memusatkan aktivitas ekonomi di mall berisiko tidak menyentuh sebagian besar pelaku ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang niat awalnya menggerakkan ekonomi justru bisa menciptakan ketimpangan baru. Di sinilah letak persoalan pentingnya: jangan sampai negara, tanpa sadar, menjadi "mesin penggerak" konsumsi di ruang ekonomi yang eksklusif, sementara ekonomi rakyat tetap tertinggal di luar pagar mall. Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, WFM berpotensi memperbesar konsentrasi manfaat ekonomi pada kelompok usaha tertentu, sehingga tujuan pemerataan ekonomi sulit tercapai.

3. Tantangan Penerapan WFM bagi ASN

Penerapan WFM bagi ASN memunculkan persoalan tata kelola pemerintahan. Tidak semua fungsi birokrasi cocok dilakukan dari ruang publik seperti mall, terutama yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengelolaan data sensitif, dan koordinasi lintas instansi. Tanpa pedoman operasional yang jelas, WFM dapat menurunkan efektivitas kerja, menimbulkan risiko keamanan informasi, serta memunculkan persepsi negatif publik terhadap profesionalisme aparatur negara.

4. Risiko Kebijakan Simbolik

Terdapat risiko bahwa WFM menjadi kebijakan yang lebih menonjol secara naratif dibandingkan dampak nyatanya. Jika tidak disertai indikator keberhasilan yang jelas, mekanisme evaluasi, dan integrasi dengan kebijakan ekonomi lain, WFM berpotensi hanya menjadi simbol inovasi tanpa kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Keterlibatan UMKM sebagai Syarat Kebijakan

Menjadikan keterlibatan UMKM sebagai prasyarat utama dalam implementasi WFM merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, WFM tidak sekadar menjadi stimulus konsumsi di ritel modern, tetapi juga sarana penguatan kapasitas dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Alternatif pertama, yaitu menjadikan keterlibatan UMKM sebagai syarat kebijakan WFM, memiliki daya tarik kuat dari sisi narasi inklusivitas dan pemerataan manfaat ekonomi. Namun dalam praktik, opsi ini menghadapi tantangan implementasi yang tidak ringan, terutama terkait mekanisme pengaturan ruang usaha, kesiapan UMKM, serta koordinasi teknis dengan pengelola pusat perbelanjaan yang berada di luar kendali langsung pemerintah pusat. Risiko kebijakan ini adalah tingginya ketergantungan pada aktor non-pemerintah, yang berpotensi memperlambat pelaksanaan dan menimbulkan ketidakkonsistenan antarwilayah.

2. Pembatasan Penerapan bagi ASN berdasarkan Fungsi dan Akuntabilitas Kinerja

Pembatasan penerapan WFM bagi ASN berdasarkan fungsi dan akuntabilitas kinerja diperlukan agar fleksibilitas kerja tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Pengaturan yang jelas terkait jenis tugas, mekanisme pengawasan, dan evaluasi berbasis output akan menjaga profesionalisme birokrasi serta mencegah munculnya persepsi negatif di masyarakat. Pada alternatif ini, yakni pembatasan penerapan WFM bagi ASN berdasarkan fungsi dan akuntabilitas kinerja, relatif paling mudah diterapkan dari sisi regulasi dan tata kelola. Pemerintah memiliki kewenangan penuh atas ASN, sehingga pengaturan dapat dilakukan melalui surat edaran, pedoman teknis, atau penyesuaian kebijakan internal tanpa memerlukan negosiasi dengan pihak eksternal. Pendekatan ini juga secara langsung menjawab kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pelayanan dan disiplin birokrasi, sehingga memiliki legitimasi politik dan administratif yang kuat.

3. Integrasi WFM dengan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penguatan Ekonomi Ekonomi

Integrasi kebijakan Work From Mall dengan agenda pemulihan ekonomi nasional dan penguatan ekonomi daerah perlu ditempatkan secara lebih konkret sebagai bagian dari kebijakan spasial dan sektoral, bukan sekadar narasi koordinatif. Dalam kerangka ini, WFM dapat diarahkan sebagai instrumen pendukung revitalisasi pusat-pusat ekonomi perkotaan yang mengalami penurunan aktivitas, khususnya di kota menengah dan kawasan penyangga ekonomi daerah.

Penerapan WFM dapat dikaitkan dengan strategi pemanfaatan ruang komersial yang tidak optimal (idle capacity) di pusat perbelanjaan daerah, serta diselaraskan dengan program pemerintah daerah dalam mendorong konsumsi lokal, penguatan sektor jasa, dan penciptaan lapangan kerja pendukung. Dengan pendekatan ini, WFM tidak hanya meningkatkan kunjungan ke mall, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterkaitan dengan sektor transportasi, kuliner, dan jasa pendukung di sekitar lokasi. Namun demikian, pendekatan integratif ini menuntut kesiapan desain kebijakan lintas sektor yang matang, termasuk keselarasan perencanaan pusat dan daerah, kesiapan regulasi turunan, serta mekanisme insentif fiskal dan nonfiskal yang jelas. Dalam jangka pendek, kompleksitas koordinasi dan kebutuhan konsolidasi kebijakan membuat alternatif ini lebih tepat diposisikan sebagai agenda menengah, bukan solusi cepat terhadap perlambatan ekonomi tahun berjalan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan yang paling layak diterapkan adalah penerapan Work From Mall secara terbatas bagi ASN berdasarkan fungsi dan akuntabilitas kinerja, dengan kewajiban keterlibatan UMKM sebagai bagian dari ekosistem pendukung kegiatan WFM. Pendekatan ini menempatkan ASN sebagai subjek kebijakan yang paling mudah diatur secara regulatif, sekaligus memastikan bahwa fleksibilitas kerja tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Penerapan WFM dibatasi hanya pada fungsi-fungsi administratif, analitis, dan koordinatif yang berbasis output, dengan indikator kinerja yang terukur serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan demikian, WFM tidak menjadi simbol kelonggaran disiplin kerja, melainkan bagian dari reformasi pola kerja yang tetap akuntabel. Pada saat yang sama, keterlibatan UMKM diintegrasikan secara fungsional, bukan simbolik. Kehadiran UMKM tidak diposisikan sebagai pengisi ruang utama mall, melainkan sebagai penyedia layanan pendukung WFM seperti katering harian, produk makanan dan minuman lokal, layanan logistik ringan, percetakan, serta produk kreatif yang dapat diakses melalui skema pop-up, tenant temporer, atau kerja sama digital. Skema ini lebih realistis, menekan biaya masuk UMKM, dan tetap memungkinkan manfaat ekonomi menyebar ke pelaku usaha kecil. Dalam kerangka Kemenko Perekonomian, rekomendasi ini paling feasible karena tidak memerlukan perubahan struktural besar, dapat segera dioperasionalkan melalui kebijakan koordinatif, serta menjaga keseimbangan antara tujuan stimulus ekonomi, tata kelola ASN, dan prinsip keadilan ekonomi. Kebijakan ini juga membuka ruang evaluasi bertahap sebelum diperluas kesekeloa integrasi yang lebih kompleks di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025. Jakarta: BPS.

CNN Indonesia. (2025). Pemerintah Kaji Program Work From Mall.

CNBC Indonesia. (2025). Siap-siap Akan Ada Program Work From Mall, Ini Bocoran Menko Airlangga.

Herald Indonesia. (2025). Bekerja dari Mall: Ide Baru Pemerintah yang Perlu Dikaji Lebih Dalam. Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Data Perkembangan UMKM Nasional. Jakarta.

Kompas TV. (2025). Pemerintah Uji Konsep Work From Mall, Pusat Belanja Disiapkan Jadi Ruang Kerja.

